

Presiden SBY: Jual Nama Saya Untuk Berantas *Trafficking*

SUATU hari di sebuah shelter di negeri jiran, Malaysia. Ruri (bukan nama sebenarnya) menangis sesenggukan di hadapan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Ruri adalah salah satu TKW (tenaga kerja wanita) asal Indonesia yang menjadi korban jaringan jual beli dan perdagangan perempuan yang meluas di (lintas Negara). Saat itu, bersama Ruri, ada sekitar 50 TKW lainnya. Di negeri jiran itu, Ruri dijanjikan pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga namun nyatanya malah dijadikan pelacur.

"Tolonglah kami Pak, kami sudah mengadu ke mana-mana tapi pelakunya tak pernah ditangkap," ujar Ruri dengan terisak. Keluh kesah Ruri memancing keharuan yang hadir, termasuk Ibu Negara. Maka SBY pun berujar, "Di depan kalian saya berjanji akan menangkap pelaku-pelakunya. Pegang janji saya!"

DUA hari kemudian, janji itu pun terwujud dengan tertangkapnya pelaku yang berasal dari Medan oleh jajaran Polri dengan ujung tombak Polda Sumut dan Polres Asahan serta koordinasi langsung dengan LO Indonesia di Malaysia Kombes Setyo Wasisto.

Keberhasilan itu mendapat apresiasi dari presiden SBY sehingga tim penyidik mendapat kehormatan dipanggil ke Istana Negara untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu di Republik ini. "Mulai sekarang bila perlu juallah nama saya, SBY, untuk memberantas perdagangan perempuan," tegasnya di hadapan para penyidik Polri. sejumlah perwira Polri dalam sebuah forum.

Sebuah komitmen memang diperlukan dalam menangani praktek perdagangan manusia yang berlangsung kasat mata ini. Komitmen inilah yang diwujudkan Presiden SBY, ketika melawat selama seminggu di berbagai Negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Kuwait dan Qatar awal April lalu.

Di Qatar, ketika melakukan di-

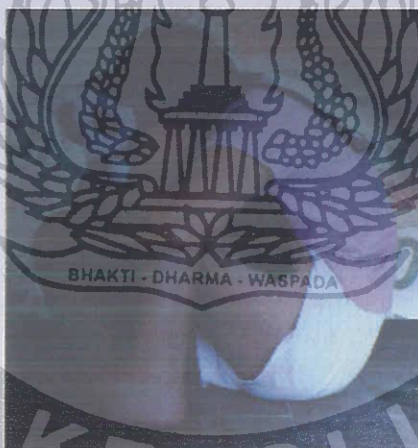
kepada sekitar 500.000 TKI yang kini bekerja di Arab Saudi. SBY bahkan menawarkan untuk kerjasama antarpemerintah untuk menjamin pelayanan yang baik kepada ratusan ribu TKI.

Ny Ani Yudhoyono, dalam kesempatan itu juga melakukan dialog terbuka dengan 45 TKI yang bermasalah yang ditampung di kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Terungkap dalam dialog tersebut berbagai kasus yang membuat beberapa TKI sesenggukan ketika menceritakan kisah dan kasusnya.

Namun kasus yang terbanyak dikeluhkan oleh para TKI justru buruknya perlakuan di Tanah Air, seperti pemerasan. Atas segala persoalan tersebut, Nyonya Ani Yudhoyono berjanji akan menyampaikannya kepada Presiden SBY untuk ditindaklanjuti menteri dan instansi terkait, seperti yang dilakukannya di Kuala Lumpur, Malaysia Desember 2005.

Nasib yang dialami para TKW asal Indonesia di berbagai negara tempatnya bekerja –memang selalu memilukan. Baik yang masuk secara legal maupun illegal. Tak sedikit dari mereka akhirnya terjebak dalam sindikat perdagangan manusia antar (lintas) negara.

Mulusnya praktek perdagangan manusia ini memang terus berjalan, seperti tak bisa dihentikan dengan korban-korban juga terus berjatuhan. Lemahnya hukum menjadi faktor pendukung makin kuatnya bisnis ini. "Ini persoalan penegakan hukum yang tak berjalan," ujar pemerhati perempuan dan anak-anak, Gadis Arivia beberapa waktu lalu di Jakarta. Menurutnya, praktek jual beli perempuan dan anak menjadi sumber pendapatan di berbagai daerah. Batam misalnya, adalah salah satu kota yang cukup banyak memunculkan kasus-kasus



alog dengan Warga Negara Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia, SBY berjanji akan melakukan pembenahan total yang dimulai dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) yang banyak dikeluhkan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Ketika berkunjung ke Arab Saudi, SBY bahkan meminta kepada Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud dan pemerintahnya memberikan perlindungan yang lebih baik

perdagangan perempuan dan anak.

Sementara Dewi Hughes, Duta Nasional untuk Kampanye mengenai Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, mengatakan kasus-kasus perdagangan wanita dan anak biasanya terjadi di daerah yang miskin, dan di Asia termasuk di Indonesia. Katanya kasus yang muncul di depannya adalah ibarat mimpi buruk dalam hidupnya. "Dan ini harus segera diakhiri," ujar pemilik Dewi Hughes International Foundation (DHIF) ini.

Sebagai duta, tugas Hughes adalah menjadi juru kampanye dan sosialisasi mengatasi masalah *trafficking* tersebut. Untuk itu Hughes harus keluar masuk daerah rawan yang diduga sebagai daerah rawan *trafficking* bersama pemerintah melalui KPP dan sejumlah LSM. Saat ini, bersama DHIF, Hughes membuat *pilot project* di Desa Gulinten di Bali, desa miskin dan terpencil yang dihuni 184 keluarga.

Sedangkan menurut Kepala Unit III/Direktorat I Keamanan Ketenamran Nasional (Kanit III/Dit I Kamtramnas) Bareskrim Polri Kombes Anton Charliyan, perdagangan manusia apabila dibiarkan akan memungkinkan bangsa kita kembali ke masa lalu, pada masa perbudakan. Tanpa batasan dan aturan-aturan yang jelas perkembangannya pun akan semakin pesat, terutama bagi negara miskin yang tak punya sumber daya alam.

Rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku juga menjadi pemicu makin maraknya perdagangan manusia tersebut. "Bisnis ini lebih kejam dari bisnis narkoba, tapi lihat sanksi hukumnya. Narkoba bisa hukuman mati sementara *trafficking* kena satu tahun saja sudah bagus," tandas Anton seraya mengutip hasil survey yang dilakukan ahli "trafficking in person" dari Amerika Robert Barlow.

Menurut Robert, bisnis perdagangan manusia jauh lebih menguntungkan dan lebih kecil risikonya ketimbang bisnis obat bius, senjata dll. Karena dalam bisnis ini tak membutuhkan modal apa-apa. Bandingkan dengan bisnis narkoba, harus ada lokasi, pabrik,



Presiden Sby, Kapolri Jenderal Sutanto dan peserta AJPO.

model, alat dan tenaga peracik. "Something biaya!" tandasnya.

Belum tuntasnya peraturan mengenai perdagangan anak (*trafficking*) menyebabkan masih maraknya tindak kejahatan *trafficking*. Rancangan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hingga saat ini belum selesai dibahas Pemerintah dan DPR-RI. Hingga sampai saat ini berbagai upaya legislasi memang telah ditempuh namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Seperti diungkapkan Koptol Dra Sri Suari M Si (Kanit V Sat IV Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya) lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus *trafficking* merupakan tantangan sendiri bagi kalangan kepolisian. "Tapi kita mencoba menyamakan persepsi bahwa perdagangan orang adalah suatu kejahatan yang melanggar integritas dan menghilangkan sisi kemanusiaan mahluk yang dinamakan manusia.

Menurutnya, meskipun belum ada UU yang menuntut secara implisist namun ada pasal-pasal dalam KUHP yang disebut Perdagangan Perempuan – takkala itu dilakukan untuk mengeksploitasi perempuan. Hanya saja, katanya, dalam prakteknya ketika kasusnya dilempar ke jaksa tak semudah yang diharapkan.

Selanjutnya, katanya, pada 29 Januari 2006 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Hukum menge-

luarkan surat edaran kepada seluruh jaksa di seluruh Indonesia untuk berani menerapkan pasal 297 tentang "Memperniagakan Perempuan dan Memperniagakan laki-laki di bawah umur".

Meskipun pasal ini sering diimplementasikan bahwa perempuan yang dimaksud adalah dibawah umur, bukan perempuan dewasa, namun masih lebih baik. "Lumayanlah minimal kita memiliki acuan yang bisa menjadi titik temu ketika kita berdebat. Kalau sebelumnya lewat pasal 296 hanya dengan sanksi ancaman, dengan pasal 297 ancamannya 7 tahun," terangnya. ***

Bukti masih lemahnya aspek hukum kasus *trafficking in person*, Analisa Bareskrim Polri

1. Masih dirasakan oleh para TKI khususnya di daerah embarkasi kepulauan TKI, baik di bandara maupun pelabuhan laut. hal ini mengakibatkan terjadinya kasus pemerasan, penipuan, penukaran uang valuta asing di bawah standar umum.
2. Masih banyak kasus-kasus yang dilaporkan oleh TKI belum terungkap
3. Belum adanya Tata Cara Kerja yang baku antar instansi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak dimiliki, sehingga berakibat tumpang tindih antara instansi dalam rangka pelayanan pengamanan TKI di berbagai wilayah embarkasi.